

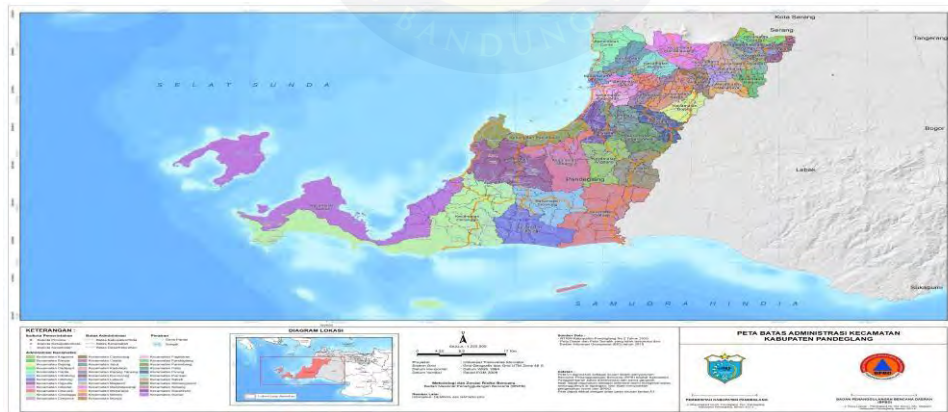
BAB IV

PEMAHAMAN DAN KEPEDULIAN MITIGASI BENCANA TSUNAMI MASYARAKAT TELUK LABUAN

4.1 Pengenalan Pengetahuan Masyarakat terhadap Mitigasi Bencana Tsunami

Desa Teluk terletak di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang yang berjarak sekitar 41 km dari Kabupaten Pandeglang dengan luas wilayah 0,97 km², letak geografisnya sebagian besar adalah pantai dengan jumlah kampung sebanyak 16 kampung yang berpenduduk sejumlah 11.337 jiwa (BPS, 2024). Secara geografis, Desa Teluk berada di pesisir dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 1 meter dan panjang pantai sekitar 1-5km². Karena lokasinya yang berada di pesisir, sehingga sebagian besar warga bermata pencaharian sebagai nelayan.

Gambar 4. 1 Peta Batas Administrasi Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.



Sumber : Dokumen BPBD

Sejarah Desa Teluk yaitu bermula pemekaran dari Desa Labuan pada tahun 1986. Sebelum menjadi sebuah Desa, Teluk merupakan kampung dan bagian dari

Desa Labuan. Penamaannya sendiri Desa Teluk karena memang secara harfiah Teluk merupakan lautan yang menjorok ke daratan.

Desa Teluk berada di wilayah rawan bencana, khususnya karena dekat dengan Selat Sunda. Gunung Anak Krakatau memiliki karakteristik fluktuatif dan sulit diprediksi. Berdasarkan pemetaan BMKG, wilayah 500 meter dari bibir pantai masuk dalam zona merah (Wawancara Bapak Agung, 16 Januari 2025).

Pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana tsunami di Desa Teluk merupakan aspek penting dalam mengukur kesiapsiagaan warga menghadapi ancaman bencana alam. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, diperoleh gambaran bahwa tingkat pengetahuan masyarakat sangat bervariasi, tergantung pada latar belakang pendidikan, pengalaman menghadapi bencana, dan akses terhadap informasi. Sebagian masyarakat Desa Teluk yang berpendidikan menengah ke atas (lulusan SMA dan perguruan tinggi) menunjukkan pemahaman yang cukup baik karena kurikulum di SMA telah mengajarkan pemahaman tentang mitigasi bencana yang tertuang dalam pelajaran geografi. Sehingga, pemahaman tentang berbagai fenomena alam, termasuk bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat berpendidikan menengah ke atas. Dengan mempelajari penyebab dan dampak bencana, masyarakat lulusan SMA dan perguruan tinggi memiliki kesadaran kesiapsiagaan serta risiko bencana terkait mitigasi bencana tsunami, pendidikan menengah ke atas juga memengaruhi akses informasi yang didapat mengenai mitigasi bencana tsunami. Sehingga, sebagian masyarakat berpendidikan menengah ke atas lebih paham mengenai indikator awal terjadinya tsunami, seperti gempa

bumi berkekuatan besar dan perubahan drastis pada permukaan air laut. Mereka juga mengetahui pentingnya waktu tanggap yang cepat dari sosialisasi disampaikan oleh BNPB yaitu sekitar 20-30 menit pasca gempa untuk melakukan evakuasi.

Fakta di lapangan menunjukkan sejumlah warga yang belum memahami secara menyeluruh tahapan mitigasi bencana, baik sebelum, saat, maupun sesudah tsunami. Kurangnya sosialisasi yang merata dari pemerintah desa menjadi salah satu penyebabnya. Beberapa warga bahkan mengaku belum pernah mengikuti simulasi bencana atau pelatihan evakuasi sejak tsunami tahun 2018 yang dilakukan dan diinisiasi oleh pemerintah setempat.

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat juga kerap kali bersumber dari pengalaman langsung maupun pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun. Contohnya, masyarakat mengenal tanda-tanda tsunami melalui fenomena alam seperti air sumur yang mendadak kering atau perilaku hewan yang tidak biasa, misalnya sejumlah kucing yang tidak terlihat dan banyaknya tikus berpindah ke tempat lain. Informasi ini menjadi bentuk mawas diri yang dilakukan oleh orang tua di keluarga yang turut memperkuat sistem peringatan dini non-formal.

Pengetahuan praktis informal yang diwariskan secara informal tidak berdiri sendiri, melainkan masyarakat juga memelihara ingatan terhadap peristiwa bencana melalui tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai historis dan spiritual. Tradisi lokal seperti *haul kalembak* menjadi sarana penting dalam merawat ingatan kolektif masyarakat terhadap bencana tsunami. *Haul* merupakan kegiatan yang biasanya diperingati atau mengenang kematian seseorang. Sementara, *kalembak* berarti terseret atau terlempar oleh ombak besar. Sehingga, dapat diartikan *haul kalembak*

berarti tradisi untuk mengenang kejadian tsunami yang disebabkan oleh letusan Gunung Krakatau. Banyaknya korban meninggal dunia karena letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 dikenang dalam tradisi *haul kalembak*. *Haul Kalembak* dilaksanakan tiap H+24 setelah idul fitri karena mengambil penanggalan hijriyah ketika peristiwa erupsi Gunung Krakatau pada 26 dan 27 Agustus 1883, diperkirakan waktu terjadinya erupsi juga di sekitar waktu setelah zuhur sebelum salat ashar, tempat pengungsian yang dirasa saat itu aman adalah di Kampung Karabohong karena tempatnya memiliki dataran yang lebih tinggi. Acara ini dilaksanakan di Masjid Agung Al-Ittihad Kecamatan Labuan dari pukul 14:30 hingga waktu salat ashar. Di tahun-tahun sebelumnya, tradisi *Haul Kalembak* menampilkan unsur budaya khas seperti tokoh adat berpakaian tradisional akan berjalan keliling kampung dengan bakiak lalu mendatangi rumah ke rumah untuk mengundang warga menghadiri *haul* bersama. Tradisi ini mempererat tali silaturahmi dan menjadi cara komunitas mengenang bersama duka dan kebangkitan setelah bencana. Dilansir dari artikel Buana Indonesia cara *haul kalembak* sendiri dihadiri oleh beberapa peneliti dari BRIN pada 24 April 2025, sehingga besar harapan Pak Basit Djoma selaku cicit dari korban tsunami 1883 acara *haul kalembak* dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda. Acara ini juga menjadi pengingat bahwa Krakatau adalah gunung aktif dan tetap menjadi ancaman. Tradisi ini juga menjadi medium edukatif yang secara tidak langsung mengenalkan pentingnya kesiapsiagaan dan kehati-hatian terhadap potensi bencana di masa depan.

Secara keseluruhan, tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk menunjukkan adanya dasar kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana tsunami. Oleh karenanya, penguatan pengetahuan melalui pendidikan formal dan sosialisasi berkala tetap diperlukan agar informasi tentang mitigasi tidak hanya diketahui oleh sebagian warga saja, melainkan dapat menjadi pengetahuan kolektif yang dimiliki seluruh lapisan masyarakat.

4.2 Sikap dan Respon terhadap Mitigasi Bencana Tsunami

Sikap dan respon pemerintah, masyarakat, dan institusi termasuk faktor krusial dalam efektivitas mitigasi bencana. Pemahaman mengenai bagaimana masyarakat dan pemerintah menerima, memahami, dan menanggapi informasi serta tindakan mitigasi akan memberikan gambaran mengenai kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap ancaman tsunami.

4.2.1 Sikap dan Respon Pemerintah terhadap Mitigasi Bencana Tsunami

Pemerintah memiliki peran sentral dalam upaya mitigasi bencana tsunami di Desa Teluk. Sikap dan respon pemerintah pasca bencana tsunami 2018 menunjukkan adanya pergeseran kebijakan, hal ini terlihat dari sejumlah program dan langkah yang telah dijalankan. Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang disahkan pada tanggal 17 Desember 2012 meliputi pembentukan BPBD, menetapkan visi misi, tugas, serta fungsi dalam penanggulangan bencana termasuk tsunami, Perda ini menjadi dasar kelembagaan pengelolaan risiko bencana di tingkat Kabupaten Pandeglang.

Pasca peristiwa tsunami 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB), menetapkan jalur evakuasi dan titik kumpul di wilayah-wilayah rawan tsunami. Selain itu, simulasi kebencanaan mulai ditingkatkan meskipun belum dilakukan secara rutin setiap tahun. Simulasi ini mencakup pembentukan tim evakuasi, pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), hingga pembagian peran dalam struktur tanggap darurat.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Tahun 2023 tentang kontinjensi gempa bumi dan tsunami di antaranya mengatur penyusunan rencana kontinjensi khusus untuk bencana gempa dan tsunami meliputi perencanaan kesiapsiagaan, alur koordinasi, peran instansi pemerintah dan non-pemerintah dalam kondisi darurat serta menyediakan pedoman teknis untuk skenario response dan evakuasi saat terjadi gempa dan potensi tsunami.

Bentuk respon strategis pemerintah adalah pembentukan Destana (Desa Tangguh Bencana) di enam kecamatan rawan tsunami, di antaranya Kecamatan Carita, Panimbang Jaya, Caringin, Cigeulis, Cimanggung, termasuk Kecamatan Labuan tempat Desa Teluk berada. Dalam Destana ini, dibentuk pula struktur organisasi di tingkat desa yang bertugas melakukan pemetaan risiko dan menyusun rencana kontinjensi lokal. Pemerintah desa bekerja sama dengan instansi terkait untuk mensosialisasikan tanda-tanda alam dan langkah evakuasi, meskipun distribusi informasi masih belum merata.

Program Kampung Siaga Bencana (KSB) juga merupakan bentuk nyata respon pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Provinsi Banten. KSB melibatkan tokoh masyarakat seperti ustaz, dan relawan lain yang dipercaya dan disegani warga. Relawan KSB dilatih dalam pengelolaan logistik bencana dan penanganan

pertama saat terjadi bencana. Ketersediaan Lumbung Sosial di kantor kecamatan menjadi penopang logistik darurat, yang berisi bahan makanan dan perlengkapan darurat lainnya.

Pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, simulasi dan pelatihan tidak dilakukan secara rutin, keterlibatan masyarakat sangat bergantung pada pendekatan personal dan kepemimpinan lokal.

Sebelumnya, pada tahun 2015 warga bersikap skeptis dengan dipasangnya plang-plang yang menunjukkan jalur evakuasi, terutama di daerah pantai yang dipasang plang “Daerah ini rawan tsunami” warga menganggap itu hanya menambah rasa takut warga setempat. Namun, pasca tsunami 2018 warga baru bisa menerima plang maupun papan informasi tersebut (Wawancara Pak Deni Staf BPBD).

Selain itu, dukungan anggaran menjadi indikator penting dalam kelangsungan program. Respon yang dianggap efektif oleh BPBD masih perlu dikaji dari perspektif partisipasi warga dan tingkat kesiapsiagaan riil di lapangan.

Kebijakan politik idealnya mengatur pembagian peran yang proporsional antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sistem peringatan dini. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan infrastruktur penerima peringatan dan mengorganisasi kesiapsiagaan masyarakat sesuai dengan kebijakan nasional, namun realitanya karena pemerintah saat ini menggaungkan efisiensi beberapa kecamatan atau wilayah masih belum memiliki sistem peringatan dini yang mumpuni, sehingga masyarakat mengandalkan informasi yang disebarkan oleh Tim Peringatan Dini via *WhatsApp Group* yang dibentuk oleh Destana.

4.2.2 Sikap dan Respon Masyarakat terhadap Mitigasi Bencana Tsunami

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 10 masyarakat dengan rentang umur 26-54 tahun, juga melibatkan 1 orang staf Desa Teluk dan 3 orang

staf BPBD 1 budayawan lokal sekaligus ketua KSB. Wawancara mendalam tentang mitigasi bencana terutama tentang keadaan tsunami 2018 dilakukan berdasarkan pengalaman yang telah dialami langsung oleh narasumber di lapangan.

Sikap dan respon masyarakat Desa Teluk terhadap mitigasi bencana tsunami menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman masa lalu, dan intensitas sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga terkait. Pengalaman langsung menjadi penyintas pada peristiwa tsunami 2018 turut membentuk sikap kehati-hatian masyarakat terhadap potensi bencana serupa di masa depan.

Respon masyarakat terhadap potensi bencana sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, tingkat pendidikan, dan akses terhadap informasi sebagian masyarakat menunjukkan sikap proaktif dalam menghadapi potensi bencana. Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan mereka dalam pelatihan, simulasi evakuasi, serta keterlibatan dalam komunitas seperti Kampung Siaga Bencana (KSB). Masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan SMA dan S-1 cenderung memiliki respon yang lebih cepat dan tepat karena mereka lebih memahami prosedur mitigasi dan informasi yang diterima dari pihak berwenang. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang menunjukkan sikap pasif. Ketidakmerataan penyampaian informasi dan minimnya simulasi rutin menyebabkan beberapa warga tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang langkah-langkah mitigasi yang harus diambil sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Mereka yang kurang terpapar informasi cenderung bersikap menyerahkan sepenuhnya penanganan bencana kepada pihak berwenang.

Sikap lainnya yang muncul adalah bentuk trauma dan kecemasan yang berlebihan terhadap gejala alam, seperti suara ombak besar atau gempa kecil. Trauma ini berdampak pada perilaku keseharian warga, misalnya menjauhi pantai dan mengalami kesulitan tidur saat mengingat kembali kejadian tsunami. Dalam konteks ini, respon masyarakat tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga emosional dan psikososial.

Masyarakat yang mengetahui mengenai sosialisasi tentang mitigasi bencana tsunami, maupun paham sekali dengan mitigasi bencana adalah yang lulusan SMA dan S-1. Masyarakat mengaku informasi mengenai adanya sosialisasi tentang mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak merata, sehingga ada yang sudah menerima informasi tersebut ada juga yang tidak.

Penting memiliki pengetahuan kebencanaan misalnya, tanda-tanda tsunami itu biasanya didahului oleh gempa. Menurut informasi *United Geological Survey* (USGS) Gempa bumi dengan magnitudo 7,0 atau lebih besar dapat memicu tsunami, terutama jika pusat gempa berada di bawah laut.

Kalau kekuatan gempa mencapai 7 Skala Richter, kemungkinan besar akan terjadi tsunami. Kalau di bawah 5, itu hanya gempa biasa. Salah satu tanda lainnya adalah air sumur menjadi kering. Kalau tidak bisa melihat pantai, bisa lihat sumur. Kalau sumur kering setelah gempa, berarti potensi tsunami besar. Kita hanya punya waktu 30 menit untuk evakuasi. Dulu, banyak yang tidak tahu, masih awam (Wawancara Bapak Riyadi, 5 Mei 2025).

Masyarakat sebagai penyintas mengalami trauma mendalam atas kejadian tsunami 2018, resah saat mendengar ombak, tidak bisa berlama-lama di pantai, bahkan beberapa dari mereka mengalami gangguan tidur.

Sebagian masyarakat mengalami perubahan dalam mencari nafkah, sebelum tsunami 2018 masyarakat khususnya yang berperan sebagai kepala keluarga

bermata pencaharian sebagai nelayan, namun pasca tsunami 2018 mengalami pergeseran yaitu menjadi pedagang. Ibu-ibu pun mengalami hal serupa, sebelum tsunami 2018 meski mereka umumnya memang ibu rumah tangga, namun tidak hanya itu banyak dari mereka yang bekerja sebagai pengolah ikan untuk dijadikan ikan asin, kemudian pasca tsunami 2018 mereka beralih sebagai buruh cuci, ada yang memang kerja di laundry ada juga yang panggilan (ketika ada yang membutuhkan jasanya). Hal ini disebabkan oleh rasa trauma yang mendalam karena pekerjaan berkaitan dengan laut yang mengingatkan mereka dengan bencana tsunami.

Masyarakat tidak hanya mengandalkan pengalaman dan pengamatan sehari-hari, tetapi juga menginternalisasi pengetahuan kebencanaan lewat praktik-praktik budaya yang terus dilestarikan, seperti tradisi lokal seperti *haul kalembak* turut berperan dalam membentuk respon kolektif masyarakat terhadap bencana. Tradisi ini bukan hanya bentuk penghormatan terhadap korban bencana masa lalu, melainkan juga sebagai sarana edukasi budaya yang mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan.

Pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1883, wilayah pesisir Banten bagian barat diterjang tsunami akibat aktivitas Gunung Krakatau. Hal ini memakan korban kurang lebih 36.000 jiwa meninggal dunia. Peristiwa ini dikenang dalam tradisi *Haul Kalembak*. *Haul Kalembak* dapat menjadi sarana untuk merawat ingatan masyarakat mengenai bencana tsunami 1883. Harapan Pak Basit atau biasa disebut Ki Sunda Labuan selaku ketua KSB dan merupakan cicit korban tsunami 1883 agar *haul kalembak* tidak menghilang begitu saja dari ingatan masyarakat, agar anak cicit

selalu mengingat ada peristiwa besar yang pernah terjadi di masa lalu dan kita bisa saling mawas diri. Secara keseluruhan, respons masyarakat menunjukkan adanya perkembangan positif pasca-tsunami 2018, meskipun masih diperlukan upaya lebih besar dalam membangun kesadaran, khususnya melalui pendekatan berbasis budaya dan penguatan komunitas lokal agar semua lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam mitigasi bencana tsunami.

4.2.3 Sikap dan Respon Institusi terhadap Mitigasi Bencana Tsunami

Respon institusi terhadap mitigasi bencana tsunami di Desa Teluk melibatkan berbagai aktor, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah desa, Dinas Sosial Provinsi Banten, serta organisasi lokal seperti Kampung Siaga Bencana (KSB). Institusi-institusi ini memainkan peran penting dalam membangun sistem kesiapsiagaan serta menyelenggarakan berbagai program mitigasi berbasis masyarakat.

Setelah peristiwa tsunami 2018, BPBD Kabupaten Pandeglang menunjukkan sikap yang adaptif dan reflektif. Mereka mulai memperkuat peran sistem peringatan dini dan memperluas jangkauan pelatihan evakuasi. Tercatat, sebanyak lima simulasi telah dilakukan oleh BPBD, ditambah sekitar lima belas pelatihan oleh lembaga lain, termasuk instansi pemerintah dan swasta. Pelatihan ini mencakup pembentukan tim evakuasi, tim pertolongan pertama (P3K), serta penyuluhan edukatif kepada masyarakat.

Respon institusional lainnya adalah pembentukan Tim Peringatan Dini dan Desa Tangguh Bencana (Destana) di beberapa wilayah yang rawan tsunami, termasuk Desa Teluk. Pembentukan struktur organisasi di tingkat desa

menunjukkan respons yang sistematis dan berorientasi jangka panjang. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas lokal agar masyarakat mampu melakukan evakuasi secara mandiri bila terjadi ancaman bencana.

Selain BPBD, Dinas Sosial Provinsi Banten juga aktif dalam membentuk dan mendampingi Kampung Siaga Bencana (KSB). KSB berperan sebagai garda terdepan dalam respons awal saat bencana terjadi. Anggotanya berasal dari tokoh masyarakat dan relawan yang tidak digaji, namun memiliki keterikatan emosional yang tinggi terhadap komunitasnya. Mereka mendapat pelatihan kebencanaan dan memiliki akses langsung ke Lumbung Sosial, yaitu pusat logistik bencana yang berada di kantor kecamatan.

Secara struktural berbagai program sudah dilaksanakan, tantangan tetap ada. Simulasi bencana belum dilakukan secara rutin tahunan dan masih bergantung pada instruksi dari pemerintah pusat atau dukungan anggaran. Keterbatasan koordinasi antar lembaga juga mempengaruhi kelancaran implementasi program di lapangan. Dalam beberapa kasus, respon institusi masih bersifat reaktif, terutama dalam hal distribusi informasi mitigasi yang belum merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, sikap dan respon institusi terhadap mitigasi bencana tsunami di Desa Teluk menunjukkan adanya kemajuan. Adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat memperlihatkan pendekatan partisipatif dalam pengurangan risiko bencana. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan frekuensi pelatihan, pemerataan sosialisasi, serta evaluasi program secara berkala.

Pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana tsunami di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat sangat beragam, bergantung pada tingkat pendidikan, pengalaman terdahulu, serta akses informasi yang dimiliki masing-masing individu.

Sebagian masyarakat, khususnya yang pernah mengikuti pelatihan atau memiliki pendidikan menengah ke atas, telah memahami konsep dasar mitigasi bencana. Mereka mengetahui tanda-tanda alam sebelum terjadinya tsunami seperti gempa bumi kuat, surutnya air laut secara tiba-tiba, atau perubahan perilaku hewan. Pengetahuan ini biasanya diperoleh dari sosialisasi oleh BPBD, program pelatihan KSB, dan pengalaman saat tsunami 2018. Namun, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya memahami langkah-langkah mitigasi bencana secara tepat. Mereka cenderung hanya mengandalkan informasi dari cerita turun-temurun atau media sosial yang belum tentu akurat. Minimnya literasi bencana juga mengakibatkan sebagian warga bersikap pasif atau meremehkan potensi ancaman tsunami.

Program simulasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sekolah, dan relawan mitigasi telah mulai menjangkau sebagian besar wilayah desa. Meski begitu, frekuensi dan konsistensinya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar melekat dalam ingatan dan sikap masyarakat. Selain edukasi formal, pengetahuan masyarakat juga diperkuat oleh kearifan lokal, seperti tradisi *Haul Kalembak*, yang berperan sebagai media pembelajaran kolektif tentang sejarah

bencana dan pentingnya kewaspadaan. Tradisi ini mampu menjadi sarana untuk menanamkan nilai kesiapsiagaan secara spiritual dan budaya.

BPBD Kabupaten Pandeglang sudah menetapkan jalur evakuasi dan titik kumpul warga. Itu juga dibantu oleh BNPB pusat. Simulasi dan pelatihan telah dilakukan, terutama sejak kejadian tsunami 2018.

Pada saat itu kami belajar banyak, khususnya mengenai tanda-tanda bencana, termasuk perubahan perilaku hewan dan perubahan kondisi alam (Wawancara Pak Edi Amhar, BPBD, 30 April 2025).

Pelatihan dan simulasi tidak dilakukan secara rutin tiap tahun, tetapi dilakukan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat maupun daerah. Di Desa Sukarame, telah membentuk Tim Peringatan Dini. Setiap tanggal 26 pukul 10:00 pagi hari dibunyikan sirine sebagai pengingat. Total pelatihan dan simulasi yang dilakukan oleh BPBD sebanyak 5 kali setelah tsunami 2018, kurang lebih sudah terlaksana 15 kali pelatihan dengan lembaga lainnya termasuk PLN. Bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu dilakukan koordinasi melalui *WhatsApp*, surat, atau pertemuan dengan instansi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, seminar dilakukan sebelum melakukan simulasi bencana agar kegiatan lebih terarah, simulasi bencana dilakukan pembentukan tim evakuasi, P3K, dan lainnya.

Setelah terjadi bencana tsunami 2018 terjadi perubahan, karena tsunami itu sendiri bersifat tsunami atopikal yaitu tsunami yang bukan berasal dari gempa tektonik maupun vulkanik, melainkan karena longsoran Gunung Anak Krakatau. Sejak saat itu dibentuk tim peringatan dini berbasis masyarakat, dibuat pemetaan risiko bencana di desa-desa rawan bencana, dibentuknya Destana (Desa Tangguh

Bencana) di enam kecamatan yaitu Sukarame, Panimbang, Carita, Labuan, Sumur, Cikeusik, dibentuk pula struktur organisasi di tingkat desa.

BPBD menganggap program yang telah terlaksana sudah efektif karena struktur organisasi sudah terbentuk (Destana), masyarakat tidak bingung saat terjadi bencana (sudah bisa evakuasi mandiri), simulasi dan sosialisasi sudah menjangkau 35 kecamatan. Namun, sekali lagi indikator keberhasilan juga bergantung pada jumlah peserta kegiatan dan dukungan anggaran.

4.2.4 Peran Kampung Siaga Bencana dalam Penguatan Respon Lokal

Kampung Siaga Bencana (KSB) dibentuk pada tahun 2011, dibentuk oleh Dinas Sosial Provinsi Banten. Keberadaannya penting dalam mitigasi dan respons awal saat bencana terjadi. KSB bukan bertugas menyelamatkan korban secara langsung seperti tim SAR (*Search and Rescue*), melainkan berperan dalam mitigasi bencana, edukasi masyarakat, koordinasi logistik, evakuasi, menyiapkan posko, dapur umum, tenda darurat, pemetaan jalur evakuasi dan jalur aman.

Syarat menjadi anggota KSB yaitu tokoh masyarakat yang disegani, memiliki keahlian (ustaz, tenaga kesehatan, tukang urut, dsb), relawan tanpa digaji. Awalnya anggota dipilih saat undangan pelatihan dari dinas. Banyak yang awalnya tidak tahu, namun akhirnya bergabung dan aktif.

Kegiatan edukasi KSB dilakukan melalui ceramah di pengajian sebelum acara utama, sosialisasi evakuasi mandiri, pemetaan jalur dan tempat kumpul saat bencana. Pada bencana tsunami 2018, jalur evakuasi dan latihan yang telah dirancang terbukti efektif masyarakat menuju lokasi yang telah dipetakan sebelumnya. KSB juga memiliki akses ke Lumbung Sosial lokasinya berada di

kantor kecamatan. Lumbung sosial sendiri merupakan tempat penyimpanan logistik bencana seperti beras, mie instan, pakaian, dll.

Tantangan Kampung Siaga Bencana (KSB) di lapangan yaitu menghadapi warga yang tidak jujur dan menyalahgunakan bantuan, minimnya logistik dan keterlambatan bantuan membuat relawan kewalahan, kurangnya edukasi membuat beberapa warga tidak siap saat bencana terjadi. Sebelum tsunami, edukasi masyarakat seringkali kurang mendapat perhatian. Banyak warga meremehkan potensi bencana. Namun, setelah kejadian nyata, kesadaran meningkat drastis. Kegiatan evaluasi Kampung Siaga Bencana (KSB) dilakukan ketika ada anggota yang pindah, pensiun, maupun meninggal dunia. Untuk koordinasi maupun komunikasi, saat ini bisa dilakukan melalui *WhatsApp group*, walaupun rapat tahunan masih rutin dilakukan.

Kampung Siaga Bencana (KSB) sendiri mempunyai keinginan untuk mendirikan menara pengawas, menara ini nantinya dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan perahu, logistik, serta tempat perlindungan darurat, menara siaga bencana ini diharapkan menjadi posko permanen untuk pemantauan dini.

4.3 Bentuk Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat terhadap Mitigasi

Bencana Tsunami

Sikap dan respons masyarakat terhadap mitigasi bencana tsunami di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Sikap tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor pengalaman masa lalu, tingkat pendidikan, pengaruh sosial budaya, serta keberhasilan komunikasi risiko dari pihak pemerintah dan lembaga terkait.

Secara umum, pasca peristiwa tsunami tahun 2018, terjadi peningkatan signifikan dalam kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan. Hal ini tercermin dari meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan simulasi, penyuluhan, dan pelatihan kebencanaan yang diselenggarakan oleh BPBD, KSB, dan organisasi relawan lainnya. Banyak warga yang mulai menyiapkan tas siaga, mengidentifikasi jalur evakuasi, serta menyimpan dokumen penting di tempat yang mudah dijangkau saat darurat.

Tidak semua lapisan masyarakat menunjukkan respons yang sama. Sebagian warga yang berpendidikan rendah (lulusan SD) masih bersikap pasif, cenderung meremehkan ancaman bencana, atau hanya bertindak saat situasi sudah genting. Ketidaktertarikan ini sebagian besar disebabkan oleh rasa trauma yang belum sepenuhnya pulih, kelelahan emosional pascabencana, atau rendahnya pemahaman terhadap pentingnya mitigasi sejak dini. Persepsi terhadap tanda-tanda bencana juga menjadi indikator penting dalam menilai sikap masyarakat. Beberapa informan mengaku bahwa sebelum tsunami 2018 mereka tidak paham bahwa perubahan air laut, suara gemuruh, atau getaran kecil bisa menjadi pertanda tsunami. Setelah mengalami sendiri, mereka lebih waspada dan reflektif terhadap fenomena alam yang sebelumnya diabaikan.

Respons masyarakat juga mulai terbentuk melalui forum komunikasi informal seperti pengajian, pos ronda, dan kegiatan gotong royong. Di ruang-ruang inilah informasi tentang mitigasi bencana seringkali dibahas secara kolektif dan lebih mudah diterima karena bersifat akrab dan partisipatif.

Kehadiran Kampung Siaga Bencana (KSB) juga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi perubahan sikap masyarakat. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan simulasi, edukasi, dan penanganan darurat, warga perlahan-lahan membentuk perilaku tanggap dan proaktif terhadap bencana.

Secara keseluruhan, sikap dan respons masyarakat Desa Teluk terhadap mitigasi bencana tsunami menunjukkan hal yang positif. Namun untuk menjaga keberlanjutan sikap tersebut, dibutuhkan program edukasi yang konsisten, partisipatif, dan mengedepankan pendekatan berbasis kearifan lokal. Upaya penguatan mental, pemberdayaan sosial, serta literasi kebencanaan harus terus dilakukan agar masyarakat tidak hanya sadar secara temporer, tetapi juga tangguh dalam jangka panjang.

Wujud nyata masyarakat peduli dengan mitigasi bencana tsunami adalah masyarakat membuat *safe place* titik kumpul untuk evakuasi yang aman, masyarakat bersama karang taruna dan KSB membuat dan menyebarkan lokasi titik aman tersebut, terbukti ketika terjadi bencana, masyarakat evakuasi mandiri dengan berlari ke tempat yang lebih aman yaitu Kampung Cieksel karena memiliki dataran yang lebih tinggi. Pasca tsunami 2018 juga masyarakat bersama YPP, Yayasan Peduli Amal Peduli Kasih menanam 1.000 pohon mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap mitigasi bencana tsunami. Selain bentuk aksi nyata yang telah disebutkan, kepedulian masyarakat bisa dilihat dari dilaksanakannya secara rutin setiap tahun tradisi *haul kalembak*, masyarakat masih berusaha menjaga ingatan kolektif agar tidak pernah lupa peristiwa erupsi Gunung Krakatau tahun 1883.

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap mitigasi bencana tsunami di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang saling berkaitan. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat setidaknya lima faktor utama yang berkontribusi dalam membentuk dan memengaruhi kesadaran serta tindakan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana tsunami.

1) Tingkat pendidikan

Pendidikan formal menjadi salah satu penentu utama pemahaman dan sikap terhadap mitigasi. Masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan menengah hingga tinggi umumnya menunjukkan tingkat kepedulian yang lebih baik. Mereka cenderung memahami istilah teknis seperti jalur evakuasi, peringatan dini, dan pentingnya tas siaga. Sebaliknya, masyarakat dengan pendidikan rendah atau tidak bersekolah kerap mengandalkan intuisi dalam merespons bencana.

2) Pengalaman langsung terhadap bencana

Pengalaman langsung mengalami bencana, terutama tsunami 2018, menjadi pemicu kuat dalam membentuk kesadaran kolektif. Masyarakat yang menjadi korban atau menyaksikan dampak langsung tsunami lebih tanggap dan waspada. Kalangan masyarakat ini umumnya berada pada rentang umur 25-50 tahun, termasuk ke dalam kelompok usia dewasa produktif pada saat peristiwa tsunami 2018 terjadi, di antaranya mengalami kerusakan rumah, kehilangan anggota keluarga, serta trauma psikologis yang mendalam. Pengalaman nyata tersebut membentuk respons yang lebih cepat dan kehati-hatian yang tinggi dalam menghadapi potensi bencana serupa di masa depan.

3) Akses informasi dan sosialisasi

Akses terhadap informasi kebencanaan, baik melalui media massa, internet, maupun penyuluhan langsung dari pemerintah dan lembaga, juga sangat menentukan. Sosialisasi mitigasi yang dilakukan oleh BPBD, KSB, dan pihak sekolah terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat. Namun, distribusi informasi yang tidak merata menjadi kendala, sehingga sebagian warga merasa tidak tersentuh program edukasi tersebut.

4) Faktor sosial dan budaya

Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas komunitas, dan tradisi seperti Haul Kalembak turut memainkan peran penting dalam membangun kepedulian. Tradisi tersebut menjadi ruang edukatif yang secara tidak langsung mengajarkan masyarakat untuk mengenang bencana dan meningkatkan kewaspadaan. Kepercayaan lokal, mitos, dan narasi budaya tentang laut dan gunung juga menjadi medium edukasi yang bersifat informal.

5) Kehadiran lembaga dan komunitas mitigasi

Keberadaan lembaga seperti Kampung Siaga Bencana (KSB), Destana, serta dukungan dari relawan dan tokoh masyarakat sangat memengaruhi tingkat kepedulian warga. Partisipasi warga dalam simulasi, pelatihan, dan forum komunikasi kebencanaan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan aktif. Tokoh informal seperti ketua RT, guru, dan tokoh agama menjadi agen penting dalam menyampaikan pesan mitigasi secara efektif.

6) Kondisi ekonomi dan mobilitas sosial

Sebagian warga menganggap bencana sebagai hal yang tidak dapat dihindari dan merasa pasrah karena keterbatasan ekonomi yang menghambat kemampuan untuk pindah ke tempat yang lebih aman atau menyiapkan kebutuhan darurat. Mobilitas sosial yang rendah juga memengaruhi cara masyarakat memandang risiko dan urgensi mitigasi.

Berdasarkan data di lapangan, terjadi kesesuaian antara Teori Respon Perilaku oleh Oliver-Smith (1996) menunjukkan bahwa masyarakat merespon bencana dengan beradaptasi, berekonstruksi, juga bertransformasi tindakan tersebut dapat dilihat dari masyarakat membentuk *safe place*, menanam mangrove, dan juga melaksanakan *haul kalembak*. Ini menunjukkan kepedulian masyarakat sejalan dengan teori respon perilaku Oliver-Smith. Begitupula dengan teori yang dipaparkan oleh Proulx & Aboud (1993) yaitu teori pengetahuan dan sikap juga selaras dengan bagaimana pengetahuan berpengaruh terhadap cara masyarakat bertindak. Terutama masyarakat yang mengalami secara langsung menjadi lebih paham apa saja yang perlu dilakukan ketika terjadi bencana di masa mendatang.